

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepemimpinan dalam masyarakat terdiri dari kepemimpinan formal seperti pemerintah maupun organisasi dan lembaga politik. Kepimpinan nonformal seperti keberadaan para ulama, tokoh budaya atau tokoh adat. Kepemimpinan nonformal dalam masyarakat sunda diperoleh dari masyarakat yang bisa bersumber dari integritas sang pemimpin, keahlian, penghargaan, atau hubungan. Sedangkan pemimpin formal diperoleh melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan setiap empat tahun. Masyarakat Jawa Barat memilih gubernur, walikota atau bupati dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Sebagian besar masyarakat di Jawa Barat adalah Masyarakat Sunda. Tipologi suku yang menempatkan laki-laki dalam kepemimpinan lebih menonjol. Salah satu daerah yang kental dengan nilai-nilai sunda adalah Purwakarta. Sistem sosial masyarakat maupun pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat kental dengan nilai sunda seperti Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, dan riang. “Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang sunda bersifat jujur dan pemberani” (Wikipedia.Org). Sikap-sikap sebagai Orang Sunda turut menentukan bagaimana seorang pemimpin dalam pemerintahan dipilih termasuk di Kabupaten Purwakarta.

Dalam Masyarakat Sunda kepemimpinan tidak hanya bersumber dari proses resmi sebuah demokrasi dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya diinginkan oleh Masyarakat Sunda adalah para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan menampilkan nilai-nilai “kasundaan” yang bersumber dari filosofi Masyarakat Sunda.

Dalam naskah Siksakandang Karesian, terdapat sepuluh pedoman yang harus dimiliki serta dilaksanakan pemimpin dalam rangka membina

serta memimpin bawahannya, yang dikenal dengan sebutan dasa prasanta yang meliputi:

- 1) pemimpin harus memiliki kebijaksanaan,
- 2) keramahan yang menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja dan beraktivitas.
- 3) *hook* (sayang atau kagum), perintah dianggap sebagai representasi kekaguman atas prestasi dari orang yang diperintahnya.
- 4) *pésok* (memikat hati atau reueus/bangga), harus mampu memikat hati bawahannya dan merupakan kebanggaan juga bagi bawahannya.
- 5) *asih* (kasih, sayang, cinta kasih, iba), perintah harus dilandasi dengan perasaan kemanusiaan yang penuh getaran kasih.
- 6) *karunya* (iba/sayang/belas kasih), sebenarnya hampir sama dengan asih, tetapi dalam karunya/karunia perintah harus terasa sebagai suatu kepercayaan.
- 7) *mupreruk* (membujuk dan menentramkan hati), seyogianya mampu membujuk dan menentramkan hati dengan cara menumbuhkan semangat kerjanya.
- 8) *ngulas* (memuji di samping mengulas, mengoreksi), melalui cara bermacam-macam.
- 9) *nyecep* (membesarkan hati dan memberikan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati).
- 10) *ngala angen* (mengambil hati), mampu menarik hati dan simpati sehingga tersambung ikatan silaturahmi yang kental dan harmonis.
(www.Garutkab.go.Id)

Masyarakat Sunda memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan masyarakat lain. Dalam memilih pemimpin, Masyarakat Sunda menginginkan pemimpin yang memiliki pandangan visioner baik tentang pendidikan, ekonomi maupun pada aspek spiritualitas menuju terbentuknya masyarakat madani. Kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat maupun sistem yang ada agar berperilaku menuju pembentukan masyarakat madani.

Salah satu masyarakat yang kental dengan nilai-nilai kasundaan adalah masyarakat Purwakarta. Hal ini tampak dari artefak budaya yang menampilkan nilai-nilai kasundaan seperti patung tokoh pewayangan yang ada di beberapa sudut Kota Purwakarta. Orientasi masyarakat yang memilih pemimpinnya didasarkan pada adanya nilai-nilai kasundaan yang terdapat pada diri pemimpinnya.

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK

(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagian besar masyarakat Purwakarta berada di pinggiran kota atau di pedesaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pinggiran kota atau di pedesaan kurang banyak mendapatkan informasi. Sedangkan arus informasi sangat berpengaruh terhadap cara berpikir suatu masyarakat. Bagi masyarakat desa, cara berpikir termasuk memilih pemimpin lebih didasarkan pada kepribadian atau bersumber dari kharisma. Sebagian masyarakat yang berada di Kota Purwakarta lebih rasional dalam memilih pemimpin. Secara umum karakteristik yang dipilih adalah pemimpin yang kental dengan karakter “urang sunda” seperti Bupati terpilih saat ini yaitu Kang Dedi Mulyadi. Pergeseran paradigma masyarakat dalam memilih pemimpin berhasil dikelola oleh bupati terpilih. Dengan menampilkan nilai-nilai pemimpin yang kuat memegang nilai-nilai sunda, Kang Dedi kembali terpilih untuk masa periode selanjutnya.

Perilaku memilih masyarakat Purwakarta merupakan suatu proses pengambilan keputusan politik yang merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik yang melekat pada diri pemilih baik secara rasional, irasional, maupun faktor situasi politik yang diciptakan oleh partai politik sesuai dengan kondisi politik yang ada. Hasil survey mengenai perilaku memilih masyarakat yang menempatkan calon tertentu sebagai kandidat terkuat belum tentu menjadi pilihan karena adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Pemimpin yang dipilih masyarakat adalah pemimpin yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Henan (2001, hlm. 15) terhadap beberapa negara seperti dinyatakan bahwa: *“Thus far, the leadership has tended to conduct a strategy of fire-fighting, dealing with problems as they arise, rather than engaging in any type of preventative strategy”*. Sebagai seorang pemimpin dalam kelompok Masyarakat Sunda Kang Dedi berhasil menampilkan dua sosok sekaligus yaitu representasi pemimpin sunda di tengah era modern dan didisisi lain adalah seorang pemimpin modern dengan visi yang cukup cerdas tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya.

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

*MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kepemimpinan dalam politik merupakan fenomena yang cukup menyita perhatian. Pemimpin atau kepala daerah silih berganti seiring dengan proses demokrasi yang berlangsung. Masyarakat memilih kepala daerah berdasarkan pemahaman masyarakat tentang pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin dalam pandangan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dimasyarakat serta memiliki keberanian. Disisi lain masyarakat ada yang memilih kepala daerah berdasarkan pengalaman. Menurut Kouzes dan Posner (2012, hlm. 35) "*For people to follow someone willingly, the majority of constituents believe the leader must be honest, forward-looking, competent, inspiring*". Maksud dari pernyataan diatas ialah seseorang akan mengikuti pemimpinnya jika konstituennya percaya bahwa pemimpinnya memiliki kejujuran, memiliki pandangan masa depan, kompeten (cakap), menginspirasi pengikutnya. Sejalan dengan pernyataan diatas seorang pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan seseorang dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitas kepemimpinan dinilai sejauh mana pemimpin dapat mendorong perilaku individu yang ada dalam organisasi menuju pencapaian tujuan.

Fungsi pemimpin adalah mendorong masyarakatnya menuju ilmu pengetahuan termasuk dalam hal berpolitik. Jarang sekali ada pemimpin yang mendorong warganya untuk melek politik. Hal ini mempengaruhi bagaimana kebijakannya terkait pendidikan politik. Seolah-olah kebijakan untuk mendorong warga agar melek politik bukan merupakan ranah seorang pemimpin. Persoalannya politik pun dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bidang yang hanya berurusan dengan korupsi, licik, maupun perseteruan. Pada dasarnya pendidikan politik sangat penting dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpolitik. Etika politik dapat dibudayakan dengan adanya pendidikan politik. Jarang pemimpin memiliki kesadaran untuk mendorong kesadaran politik masyarakatnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal melalui partai atau lembaga swadaya masyarakat. Kecenderungan untuk memisahkan kepemimpinan dengan upaya

membangun kesadaran politik terjadi secara umum. Pemimpin seolah enggan untuk mendorong kesadaran berpolitik warganya.

Adanya kesadaran berpolitik hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan politik. Kesadaran berpolitik akan mendorong partisipasi politik secara optimal. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat luas sebagai awal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Partisipasi politik yang didasarkan pada hasil pendidikan politik dapat mengurangi apatisisme sebagian masyarakat yang apatis terhadap proses politik yang tidak dilandasi oleh etika politik.

Masyarakat yang sadar secara politik memiliki peran yang strategis sebagai agen-agen perubahan bagi masyarakat. Partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran berpolitik akan mendorong upaya memperbaiki tatanan politik demi kesejahteraan masyarakat. Lemahnya pendidikan politik dan kesadaran pemimpin terhadap pendidikan politik merupakan salah satu wujud demokrasi yang tidak mendidik serta menimbulkan krisis demokrasi karena memunculkan ketidakberdayaan masyarakat akibat kurangnya pendidikan berpolitik. Para pemimpin jarang mendorong pendidikan politik bagi masyarakatnya.

Pendidikan politik ditujukan untuk mempersiapkan anggota masyarakat agar mampu berperan sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi politik secara aktif. Pendidikan politik yang mengandung kesatuan antara dimensi ideal dan dimensi manifes prinsip berpancasila dalam partisipasi politik pembangunan daerah diwujudkan oleh seorang pemimpin melalui interaksinya dan kerja nyata seorang pemimpin dengan dan bersama masyarakat. Upaya untuk mendidik masyarakat agar menyadari perannya dalam berpolitik tidak mudah ditengah masyarakat yang menganggap "politik itu kejam".

Pendidikan politik merupakan sebuah proses agar masyarakat memiliki kepekaan terhadap persoalan politik. Kepekaan tersebut mendorong adanya kesadaran masyarakat Purwakarta terhadap dinamika politik yang berkembang di Purwakarta. Mengetengahkan masalah model kepemimpinan

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

*MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

politik sunda dalam konteks pendidikan politik merupakan sebuah upaya untuk mendorong permasalahan-permasalahan dalam kaitannya dengan kepemimpinan sunda terangkat sebagai kajian ilmiah sehingga dapat dihasilkan gambaran mengenai kepemimpinan sunda dalam konteks pendidikan politik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada di masyarakat serta kaitannya dengan perilaku pemimpin dalam pendidikan politik, peneliti bermaksud mengambil judul penelitian **Model Kepemimpinan Politik Sunda Dalam Konteks Pendidikan Politik (Studi Kasus Bupati Purwakarta)**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Secara Umum: Bagaimana kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik?
2. Secara Khusus:
 - a. Bagaimana sikap kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik?
 - b. Bagaimana kredibilitas kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik?
 - c. Bagaimana konsistensi kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik?
 - d. Bagaimana visi dan misi serta tujuan kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan politik Orang Sunda dalam konteks pendidikan politik

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Sikap kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik.
- b. Kredibilitas kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik
- c. Konsistensi kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik
- d. Visi dan misi serta tujuan kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam rangka pengembangan teori-teori dan konsep-konsep mengenai konsep kepemimpinandalam Masyarakat Sunda serta bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh pemimin politik yang berasal dari etnis Sunda.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dipahaminya perspektif masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap figur kepemimpinan Orang Sunda.
- b. Diketuinya solusi yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk menentukan figur yang tepat dalam memimpin Kabupaten Purwakarta sesuai dengan keinginan masyarakat.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian skripsi, identifikasi dan perumusan masalah, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Hal ini berguna sebagai gambaran umum dari penelitian.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka berisikan mengenai teori yang dikaji dan kedudukan masalah dalam penelitian. Konsep kepemimpinan yang menjadi acuan dalam penelitian akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab tiga mengenai metode penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan judul penelitian dan arah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini terdiri dari pengolahan data dan analisis data. Dalam bab ini juga peneliti melakukan pengolahan dan analisis data hasil penelitian. Hasil penelitian di lapangan diolah guna mengetahui inti permasalahan sehingga bisa ditarik kesimpulan.

Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab kesimpulan dan saran merupakan bab lanjutan dari bab sebelumnya mengenai penelitian dan pembahasan. Bab kesimpulan dan saran peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan sekaligus memberikan saran terhadap hasil penelitian agar tercipta perbaikan dalam kepemimpinan.